BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. CITES tidak secara langsung mengatur mengenai konservasi satwa dan tumbuh – tumbuhan, karena CITES merupakan konvensi internasional yang membahas tentang perlindungan spesies. Tetapi negara – negara dapat mengimplementasikan peraturan atau *appendix* CITES untuk membantu membuat undang – undang perlindungan satwa dan tumbuh – tumbuhan. Dimana peraturan tersebut terbagi menjadi 3 *appendix*, dimana tiap – tiap *appendix* memiliki peraturan – peraturan yang berbeda. Mulai dari *appendix* 1 yang tidak memperbolehkan sama sekali perdagangan spesies tumbuh – tumbuhan dan satwa maupun bagian – bagian tubuhnya kecuali dengan alasan penelitian dan tidak membahayakan kelangsungan hidup suatu spesies dan tidak digunakan untuk alasan komersil. Di *appendix* II CITES hampir sama dengan *appendix* I, tetapi yang membedakannya adalah di *appendix* II tidak mensyaratkan adanya izin impor dari negara pengimpor karena alasan komersial hanya berlaku di *appendix* I. Di *appendix* III, ekspor spesies memerlukan izin ekspor negara asal sedangkan impornya sertifikat asal spesimen (*certificate of origin*) serta izin ekspor apabila spesimen itu diimpor dari negara yang telah memasukkan species ke dalam

Appendix III. Dengan aturan – aturan tersebut diharapkan konservasi satwa dan tumbuh – tumbuhan dapat berjalan lancar karena ketatnya aturan

2. Harimau Sumatera merupakan spesies harimau yang tersisa di Indonesia dimana dulu Indonesia memiliki 3 spesies harimau, Harimau Bali dan Harimau Jawa. Harimau Sumatera termasuk *endangered species* oleh IUCN dan termasuk ke dalam kategori *appendix I* CITES yang artinya dilarang untuk diperjual belikan spesies ini maupun bagian – bagiannya. Harimau Sumatera merupakan spesies yang sangat penting di kehidupan kita, karena Harimau Sumatera merupakan predator puncak yang mengatur ekosistem. Dan jika Harimau Sumatera tidak ada lagi atau punah, maka sistem ekosistem dapat rusak. Harimau Sumatera juga dianggap sakral bagi masyarakat sekitar, banyak kepercayaan masyarakat yang menganggap Harimau Sumatera merupakan nenek moyang mereka dan jika bertemu dengan Harimau Sumatera harus menyapa dengan berbagai sebutan. Oleh karena sebab – sebab tersebut populasi Harimau Sumatera harus diperbaiki, pemerintah sudah melakukan upaya – upaya dalam menyelamatkan populasi Harimau Sumatera. Karena sejatinya musuh terbesar Harimau Sumatera merupakan manusia itu sendiri, manusia berburu Harimau Sumatera karena banyaknya peminat dari bagian – bagian tubuh Harimau Sumatera yang dipercaya oleh beberapa orang sebagai obat – obatan dan beberapa orang yang menjadikan kulit Harimau Sumatera sebagai hiasan.

B. SARAN

1. Pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan alam dan isinya dan harus lebih peduli terhadap alam Indonesia. Pemerintah kita cenderung kurang peduli dengan kasus – kasus yang berhubungan dengan alam seperti pemnbakaran hutan, perburuan satwa dilindungi, dan lainnya. Dan karena maraknya kasus – kasus perburuan Harimau Sumatera, pemerintah harus tuntas mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam perburuan Harimau Sumatera ini, karena Harimau Sumatera tidak akan diburu oleh pemburu jika tidak ada permintaan yang ada.
2. Sanksi yang diberikan ke orang – orang yang melakukan perburuan Harimau Sumatera harus lebih besar karena hukuman yang diberikan dirasa kurang daripada hasil yang mereka dapatkan dari menjual bagian tubuh Harimau Sumatera.
3. Pemerintah juga harus berkerja sama dengan masyarakat terutama yang tinggal berdekatan dengan habitat Harimau Sumatera. Pemerintah juga harus tegas dengan masyarakat – masyarakat yang mengambil habitat Harimau Sumatera, karena habitat Harimau Sumatera makin menyempit. Penyempitan habitat ini terjadi karena masyarakat sekitar mengambil habitat Harimau Sumatera untuk dijadikan lahan pertanian maupun untuk ternak.
4. Melakukan pendekatan dengan masyarakat tentang pentingnya Harimau Sumatera dan satwa – satwa langka/dilindungi lainnya. Beberapa masyarakat tidak tahu apa saja satwa maupun tumbuh – tumbuhan yang dilindungi, oleh karena itu masyarakat kita harus diberitahu betapa

pentingnya satwa dan tumbuh – tumbuhan yang dilindungi ini bagi ekosistem kita.

5. Harus ada Perda yang mengatur tentang perlindungan binatang yang dilindungi. Setiap kasus perburuan Harimau Sumatera, pemerintah selalu mengikuti Undang – Undang dan Peraturan Menteri. Pemerintah daerah tidak secara langsung melindungi Harimau Sumatera sehingga daerah tidak focus dalam melindungi Harimau Sumatera
6. Pemerintah kurang serius dalam permasalahan sumber daya alam. Dapat dilihat pemerintah Indonesia memerlukan waktu lama untuk meratifikasi konvensi CITES dan juga memerlukan waktu bertahun – tahun dalam membuat peraturan perundang – undangannya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kita tidak serius dalam melindungi sumber daya alamnya yang kaya
7. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku lebih ringan daripada yang ada di hukum laut. Denda yang didapatkan jika berburu Harimau Sumatera maksimalnya adalah 100 juta rupiah, sedangkan menangkap hewan laut yang dilindungi adalah 250 juta rupiah. Perbedaan denda ini harusnya disamakan antara spesies yang ada dilaut maupun yang ada di darat dan udara
8. Setiap kasus penangkapan pemburu satwa dilindungi selalu saat sedang melakukan transaksi dan bukan saat menjalankan aksinya. Polisi hutan di Indonesia kurang serius dalam menjalankan tugasnya, sehingga pemburuan terus terjadi. Polisi hutan hanya sering menemukukan alat jerat tanpa tahu

siapa pemilik alat tersebut dan menangkap para pemburu yang sudah melakukan pemburuan